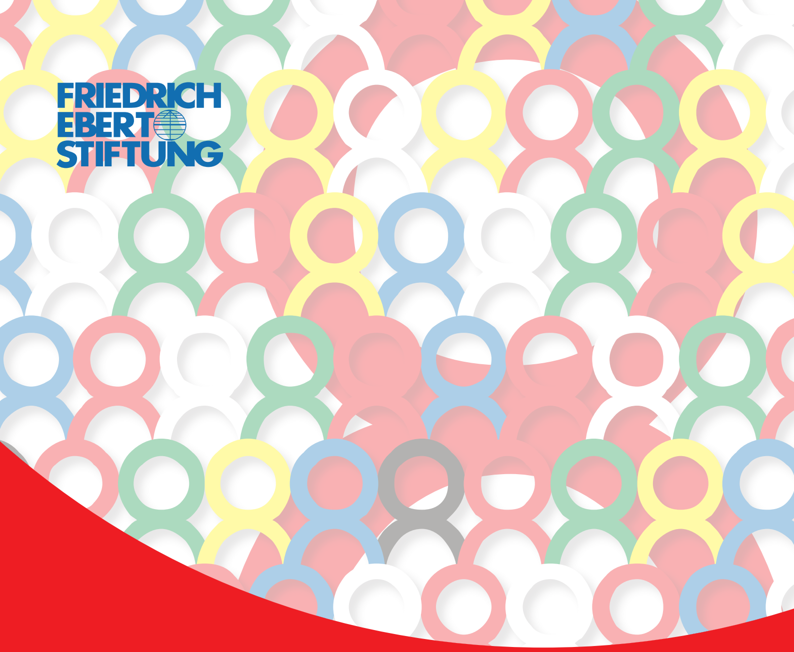
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG



Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa

Thomas Meyer

Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa

Thomas Meyer

Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa

Penulis: Prof. Dr. Thomas Meyer

Diterbitkan oleh:
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730/Indonesia
Tel.: +62-21-7193711
Fax:+62-21-71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes.or.id

Cetakan Pertama, Juli 2008
Cetakan Kedua, Desember 2009
Cetakan Ketiga, Mei 2012

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan ara apapun, termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjualbelikan

Daftar Isi

Pendahuluan

Partai politik adalah motor dan alat yang paling utama dalam menciptakan masyarakat yang demokratis – namun hal ini hanya terjadi apabila mereka mengorganisir diri mereka sendiri secara demokratis. Pemimpin partai yang otoriter sering kali mendominasi masyarakat pra-demokratis untuk jangka waktu yang lama, terutama pada masyarakat yang sedang mengalami transformasi atau berada pada tahap awal menuju demokrasi.

Tulisan ini berusaha menjelaskan kondisi internal partai yang demokratis serta jalan untuk mencapainya. Dengan demikian, program dasar partai dan terutama proses perkembangannya memainkan peranan spesial disini. Peraturan partai yang baik akan membangun nilai-nilai dasar demokrasi dan menjamin penerapannya, dan akan menjadi kunci keberhasilan demokrasi internal partai.

1. Demokrasi membutuhkan partai

Ketidakpuasan yang diakibatkan karena kurangnya demokrasi di dalam partai dan keinginan mereka untuk selalu berkuasa di kehidupan publik dan sosial, sering kali melahirkan klaim-klaim yang menuntut partai untuk mundur dari kehidupan berpolitik, dengan alasan karena demokrasi murni tidak membutuhkan partai politik manapun. Pihak yang menuntut ini mengharapkan **demokrasi akar rumput** yang seutuhnya akan lahir dari pengalaman mengalami politik keterwakilan dan lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, pemerintah dan parlemen, dimana mereka memiliki kecenderungan untuk menjadi independen dan terpisah dari masyarakat dan pemilihnya. Partai-partai berupaya membangun eksistensi mereka, dan lambat laun kepentingan mereka akan semakin kuat sehingga secara bertahap terlepas dari kepentingan dan pendapat orang-orang yang seharusnya mereka wakili. Demokrasi akar rumput yang radikal didasari pada keyakinan bahwa pada akhirnya yang mampu memenuhi permintaan demokrasi hanyalah pemerintahan yang langsung berada di bawah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah.

Keputusan-keputusan demokratis harus dibuat kapanpun ketika warga negara hidup bersama-sama dan menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Menurut

konsep ini, demokrasi langsung harus dipraktekan di rapat-rapat kota dan asosiasi, dan sebisa mungkin tanpa melibatkan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi penengah. Kapan pun warga negara ingin menyelesaikan urusan mereka, mereka akan datang bersama-sama dan mendiskusikan secara langsung alternatif-alternatif sebagaimana layaknya mitra yang setara, membuat keputusan dan menerapkannya untuk masyarakat.

Dengan demikian, "masyarakat sipil" sebagai sebuah bentuk jejaring yang terdiri dari warga negara yang berpartisipasi secara aktif tanpa perlu berada dalam organisasi tertentu menjadi satu-satunya kekuasaan politik dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terkait dengan seluruh pertanyaan politik. Menurut model ini, keinginan rakyat dalam demokrasi langsung dapat ditransformasikan secara utuh, langsung dan tidak akan berubah menjadi keputusan politik praktis.

Akan tetapi, model ini dapat menyesatkan. Demokrasi langsung hanya dapat berhasil jika melibatkan komunitas politik yang berukuran kecil dengan beberapa ribu warga negara. Model ini tidak akan sesuai untuk masyarakat besar yang memiliki jutaan warga negara yang tersebar di wilayah yang cukup besar.

Ketika pertanyaan-pertanyaan utama tentang politik regional, nasional atau bahkan global memerlukan

jawaban, demokrasi pun memerlukan partai politik agar dapat berfungsi. Unsur demokrasi langsung dapat melengkapi partai pada tingkatan individu, tetapi tidak akan dapat menggantikannya.

Demokrasi tidak dapat direalisasikan di negara besar yang penduduknya tersebar dan khususnya tidak dapat diterapkan di dalam masyarakat global tanpa adanya tumpang tindih lembaga-lembaga perwakilan yang berada di bawah kekuasaan perwakilan yang demokratis.

> **Partai-partai politik adalah bentuk organisasi yang utama dalam demokrasi moderen. Dengan demikian, organisasi tersebut harus sejalan dengan norma-norma demokrasi yang sebenarnya.**

Segala bentuk kritik terhadap struktur organisasi dan metode kerja partai politik pada akhirnya akan memberikan keuntungan untuk demokrasi karena akan mengarah pada reformasi partai demokratis. Agar dapat berjalan dengan efektif, demokrasi tidak membutuhkan pemimpin partai yang otoriter, melainkan partai demokratis yang beranggotakan massa.

2. Demokrasi Partai Partisipatoris

Model demokratis minimalis berasumsi bahwa fungsi demokrasi yang paling penting dapat terpenuhi apabila ada dua partai atau lebih yang bersaing merebutkan kekuasaan dan kemudian pemilih menentukan partai mana yang akan memperoleh kekuasaan pemerintahan. Pada model ini, masyarakat tidak terlibat dalam menjalankan kontrol penuh secara konstan dan berpartisipasi dalam kekuasaan. Masyarakat tidak dapat mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi setelah pemilihan. Dan pada pemilihan berikutnya, sering kali mereka sudah terlambat untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting.

Terlebih lagi, warga negara yang kontribusi politiknya terbatas hanya turut ambil bagian pada saat pemilu, pada umumnya kurang memiliki informasi mengenai hal-hal yang penting sehingga dengan demikian kesempatan mereka untuk melakukan aksi-aksi demokratis cenderung terbatas. Ketidakpercayaan kepada partai, yang muncul di permukaan dan tetap berada di sana dalam keadaan-keadaan tertentu, sering kali dibenarkan dan sulit untuk diatasi.

Kondisi demokrasi yang seutuhnya paling sejalan dengan demokrasi partisipatoris dengan adanya kontribusi permanen dari sejumlah warga negara dalam keputusan-keputusan politik.

Tiga instrumen paling penting untuk merealisasikan demokrasi partisipatoris adalah

- masyarakat yang berfungsi, independen dan kritis
- masyarakat sipil yang aktif
- partai demokratis yang beranggotakan massa dan terbuka kepada masyarakat.

Demokrasi partai yang pluralistik dapat menggabungkan efektifitas politik dan partisipasi satu sama lain. Dalam demokrasi yang multi partai, berbagai partai bersaing satu sama lain untuk memperebutkan pengaruh, kekuasaan dan membentuk kondisi masyarakat. Di satu sisi, partai merupakan organisasi besar yang menggunakan sistem sentralisasi terbatas dan terdapat di seluruh wilayah negara. Apabila mereka terorganisir dengan baik, mereka akan dapat mengkombinasikan pembangunan tujuan-tujuan politik di dalam masyarakat, kota-kota, dan desa-desa dengan proses pengambilan keputusan yang dinilai adil di seluruh tingkatan organisasi politik, dari tingkat negara bagian sampai ke tingkat nasional. Di tingkat

akar rumput, demokrasi partai yang berfungsi dengan baik terintegrasikan ke dalam masyarakat sipil yang luas dan aktif.

Partai-partai hanya akan dapat meraih partisipasi demokratis, kontrol kekuasaan, dan integrasi politik di masyarakat apabila mereka berfungsi secara demokratis di dalamnya.

Di satu sisi, partai-partai demokratis dapat secara efektif mengkoordinasikan seluruh level politik melalui langkah-langkah yang kompak. Dengan demikian, mereka dapat membentuk seluruh bagian masyarakat dengan memfokuskan diri pada sasaran. Di sisi lain, mereka dapat mengorganisir partisipasi aktif dari sejumlah besar orang dari berbagai tingkatan pengambilan keputusan dan proses implementasi, apabila mereka terorganisir secara demokratis dari dalam. Dan ketiga, mereka mewakili hubungan yang konstan dan aktif antara masyarakat sipil dan lembaga-lembaga negara.

Pemikiran-pemikiran, kepentingan-kepentingan, nilai-nilai, opini dan harapan dari masyarakat sipil dibawa ke dalam partai, disesuaikan dan dikonsentrasikan ke dalam program-program praktis partai. Dengan cara ini, mereka dapat diterjemahkan ke dalam tindakan

praktis di parlemen dan pemerintahan ketika partai memenangkan pemilihan. Dengan demikian, partai-partai demokratis membantu tujuan integrasi politik negara tersebut.

Persaingan antar banyak partai memberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah secara efektif dan sistematis di setiap waktu ketika alternatif politik tersedia. Struktur dan diskusi publik terbatas yang kritis ini akan selalu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentukan pilihan diantara sejumlah alternatif politik.

Demokrasi partai yang berfungsi dengan baik akan secara produktif menghasilkan persaingan politik melalui diskusi publik program-program aksi politik yang bertujuan untuk kebaikan bersama dan melibatkan warga negara yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proses politik. Cara ini akan mengkombinasikan sasaran politik demokratis berupa efektifitas dan partisipasi.

Agar dapat berfungsi seperti ini, tidak hanya dibutuhkan lembaga yang baik tetapi juga budaya politik demokratis yang sama di dalam hati dan pikiran warga negara Semua orang harus mengakui legitimasi partai lain di dalam kegiatan praktis mereka serta membatasi konflik yang terjadi agar tidak merugikan demokrasi itu sendiri. Demokrasi internal partai juga tidak dapat dianggap dan dipraktekan sebagai suatu kelemahan, tetapi lebih sebagai kekuatan partai dalam bertindak.

3. Pekerjaan Partai-Partai Demokratis

Agar demokrasi moderen dapat berjalan dengan baik, partai politik harus memenuhi sejumlah fungsi atau mendukung demokrasi. Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi ini dengan baik, maka partai-partai memerlukan pengaturan internal mereka sendiri.

Apabila partai-partai tidak menjalankan fungsi dasar mereka untuk periode waktu yang lama, mereka akan kehilangan penghormatan, dukungan dan pada akhirnya kehilangan legitimasi di masyarakat – hal ini dapat kita lihat dari berbagai contoh di masa lalu ataupun masa kini – dan kemudian biasanya akan menjadi target kontra-gerakan di masyarakat, seperti protes, oposisi di luar parlemen atau bahkan kontra-gerakan yang militan.

Dengan demikian, memenuhi fungsi demokrasi yang selayaknya harus berada dalam kepentingan partai, seperti halnya demokrasi untuk kepentingan negara.

Hal yang paling penting dari fungsi-fungsi ini adalah:

- Gabungan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat agar dapat mengembangkan proyek-proyek mayoritas.
- Kegiatan dan presentasi platform pemilu dapat menawarkan kemungkinan-kemungkinan alternatif untuk masyarakat dalam membentuk ekonomi, negara dan masyarakat.

- Kontribusi penting untuk membentuk proses pembangunan tujuan politik di masyarakat melalui presentasi pemikiran-pemikiran, evaluasi dan langkah-langkah alternatif dalam mengatasi permasalahan politik masyarakat.
- Sosialisasi dan pelatihan politik untuk anggota partai dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk terus berpartisipasi dalam politik serta mengajarkan mereka tanggung jawab dan kepemimpinan politik melalui jabatan-jabatan di pemerintahan.
- Pelatihan untuk kandidat yang akan menjadi pejabat pemerintah dan melakukan supervisi yang efektif terhadap mereka selama menduduki jabatannya.
- Memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk partisipasi secara terus-menerus dari kelompok masyarakat yang dipersiapkan untuk kegiatan politik (termasuk juga diantara masa pemilihan).

Telah terbukti bahwa fungsi utama demokrasi ini hanya dapat dipenuhi oleh partai-partai yang beranggotakan massa.

4. Tiga Jenis Partai

Pada awal pembangunan demokrasi di suatu negara, sering kali terdapat berbagai jenis partai yang bertahan untuk periode waktu yang cukup lama meskipun keberadaan mereka mengancam atau bahkan dapat mengganggu pembangunan demokrasi yang seutuhnya.

Dalam sejarah abad 20 ini, pada prinsipnya seseorang dapat membedakan tiga jenis partai politik yang memiliki bentuk spesifik di berbagai negara dan benua, yaitu:

1. **Partai dengan Kepemimpinan Otoriter**
2. **Partai yang terpusat pada tokoh/figur tertentu**
3. **Partai beranggotakan massa**

1. **Partai dengan kepemimpinan otoriter.** Partai dapat dinyatakan sebagai partai kepemimpinan otoriter murni apabila partai tersebut diatur menurut satu kepribadian kepemimpinan yang otoriter beserta orang-orang terdekatnya. Para pemimpin ini sering kali mendirikan partai, menunjuk pengurusnya, dan memutuskan sendiri cara penerimaan anggotanya, sehingga dengan demikian menganggap partai tersebut sebagai hak milik pribadi mereka.

Bawahan harus bertanggungjawab ke atasan:

keanggotaan partai tidak berdasarkan demokrasi, tetapi lebih sejumlah pengikut yang bergantung pada atasannya. Kekompakan partai diperoleh melalui suatu hubungan ketidakjujuran yang tidak setara. Para pendukung memperoleh keuntungan pribadi dengan syarat bersedia untuk mengikuti pemimpinnya tanpa syarat dan tanpa kritik.

Partai dengan kepemimpinan yang otoriter dapat meraih kesuksesan di dalam demokrasi untuk periode waktu tertentu, dimanapun diijinkan atau memungkinkan, dengan cara membatasi keinginan anggota partai untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini akan berjalan dengan baik sepanjang kesuksesan politik dapat diperoleh, terutama dengan berpartisipasi di tingkat pemerintah pusat. Keuntungan-keuntungan berupa jabatan dan penghasilan di pemerintahan serta gengsi dapat dianugrahkan kepada pengikutnya, meskipun bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Para pengikut dapat memperoleh keuntungan pribadi dengan syarat bersedia mengorbankan hak suara mereka di politk.

2. Partai yang terpusat pada tokoh/figur tertentu. Jenis ini melibatkan organisasi-organisasi dimana terdapat sejumlah tokoh – yaitu individu-individu yang memiliki posisi terpandang di ekonomi, pemerintahan dan masyarakat – yang membentuk kepemimpinan

kolektif. Sering kali, seperti yang terdapat dalam tradisi Eropa, partai yang terpusat pada tokoh tertentu ini mengembangkan liberalisasi dan demokratisasi pada tahap awal ketika mereka mencari keterwakilan politik di masyarakat, namun bentuk ini tidak dikembangkan menjadi partisipasi massa yang lebih luas lagi.

Karakteristik hubungan antara tokoh-tokoh dan anggota partai ini dapat lihat dengan adanya kepercayaan dan rasa hormat ganda. Anggota mempercayai integritas moral dari tokoh yang mewakilinya dan mengharapkan tokoh-tokoh ini dapat menyeimbangkan kepentingan rakyat banyak dengan kepentingan kelompok pendukung mereka yang berasal dari kelompok elit, dimana mereka biasanya berasal. Dan anggota mempercayai bahwa tokoh-tokoh ini mampu meraih banyak manfaat untuk mereka, dengan keterampilan khusus dan jejaring sosial yang dimiliki, daripada para anggota tersebut melakukannya sendiri dengan keterampilan dan jejaring mereka yang terbatas.

Agar partai jenis ini dapat berhasil, sebagian besar masyarakat harus merasa diri mereka terwakili secara efektif oleh tokoh-tokoh ini dan berharap tokoh-tokoh ini akan memiliki pengaruh kuat dalam membangun tujuan negara. Para tokoh ini adalah profesor terkenal atau bagian dari keluarga yang berpengaruh atau petani ternama di suatu wilayah.

Partai yang terpusat pada tokoh/figur ini terbukti menjadi fenomena transisi yang istimewa dalam hubungan politik dan proses perubahan dari masyarakat yang otoriter menjadi masyarakat yang demokratis. Di satu sisi, mereka masih mewakili kultur politik masyarakat lama dengan ambisi mereka terhadap pemimpin-pemimpin terdahulu yang dilegitimasi melalui jabatan-jabatan dan tradisi di pemerintahan. Di sisi lain, jenis partai ini merupakan satu langkah besar menuju partisipasi yang pluralistik.

3. **Partai Beranggotakan Massa.** Partai ini berdasarkan kepada prinsip organisasi keanggotaan massa, dimana prinsip ini menentukan keputusan-keputusan yang paling penting tentang staf dan politik melalui pemilihan internal partai.

Partai jenis ini telah menjadi standar lansekap partai-partai Eropa dan secara bertahap menemukan bentuknya di dalam proses demokrasi di sebagian besar masyarakat yang mengalami transformasi. Dasar pemikiran dan pengorganisasian partai beranggotakan massa ini berdasarkan pada prinsip bahwa seluruh bagian masyarakat harus terwakili melalui perwakilin aktif di dalam partai. Anggota-anggota partai ini, yang merupakan perwakilan hampir seluruh bagian masyarakat dan ditujukan ke beragam partai atas dasar kepentingan dan nilai-nilai politik dasar mereka, bekerja

melakukan kegiatan dan proyek-proyek politik di dalam forum debat terbuka. Pribadi-pribadi pemimpinnya dipilih atas dasar yang paling dapat mewakili platform bersama, paling meyakinkan untuk masyarakat umum, dan paling dapat mengimplementasikan sasaran partai secara efektif di dalam lembaga-lembaga politik seperti parlemen dan pemerintah.

Partai beranggotakan massa juga membutuhkan pribadi-pribadikepemimpinanyangkuatdanmeyakinkan. Apabila pemimpin terpilih berupaya mencapai gaya kepemimpinan demokratis partisipatif, maka dominasi orang-orang tertentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip partai beranggotakan massa. Dalam partai sosial demokrat Jerman, hal ini terjadi pada saat Willy Brandt menjadi pemimpin partai untuk kurun waktu yang cukup lama. Melalui gaya kepemimpinan dan metodenya yang integratif, salah satunya dengan cara melibatkan sejumlah besar anggota dan perwakilannya di dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan, beliau tidak hanya mencerminkan tujuan politik dasar partai, tetapi juga mewakili prinsip demokrasi internal partai yang selalu dipertimbangkan secara cermat di dalam setiap keputusan.

Partai beranggotakan massa dengan demokrasi internal partai mendukung demokrasi partisipatoris. Mereka dapat bertahan di bawah kepemimpinan yang kuat, hanya apabila kepemimpinan tersebut bertindak dengan cara yang integratif secara demokratis.

5. Demokrasi Internal Partai

Sudah jelas bahwa partai politik hanya dapat menjalankan seluruh kegiatan demokratis mereka di dalam pemerintahan, dimana hal ini sangat penting untuk dapat memenuhi fungsi politik mereka yang sesuai dengan situasi internal yang dibentuk secara demokratis.

Demokrasi internal partai merupakan alternatif nyata dari partai dengan kepemimpinan otoriter karena dengan cara ini dapat menjamin kontrol atas kepemimpinan, pemilihan dan partisipasi anggota partai dalam proses pengambilan keputusan.

Hanya dengan menjalankan demokrasi di internal partai secara cukup, kita dapat menjamin pengaruh partai di masyarakat dan fungsi demokrasi dasar mereka dijalankan secara efektif.

Hanya demokrasi internal partai yang dapat menjamin bahwa partai tidak akan menyalahgunakan posisinya dan melumpuhkan atau membatasi demokrasi begitu mereka memperoleh kekuasaan melalui pemilihan yang demokratis. Demokrasi internal di semua partai adalah bagian dari sistem yang menjaga demokrasi dari

kehancuran.

Di dalam demokrasi yang terkonsolidasi, demokrasi internal partai tidak dapat diserahkan begitu saja pada diskresi pimpinan partai. Seperti yang telah dibuktikan secara efektif di berbagai negara, termasuk di Jerman, demokrasi internal partai harus dijamin oleh hukum yang disahkan– baik oleh anggota partai atau pemerintah – yang apabila perlu dapat bertentangan dengan keinginan pimpinan partai.

Demokrasi internal partai yang efektif setidak-tidaknya membutuhkan langkah-langkah pencegahan organisatoris yang harus dijamin oleh hukum dan dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan jika terdapat keraguan. Langkah-langkah tersebut adalah:

- *Diskusi yang terbuka dan bebas* oleh anggota partai tentang cara partai menanggapi sejumlah permasalahan penting dan politik pimpinan.
- *Pemilihan internal partai* yang bebas untuk seluruh jabatan pemerintahan yang dikuasai di dalam partai.
- *Musyawarah nasional partai secara rutin*, setidak-tidaknya dua tahun sekali, dengan mengadakan pemilihan pemimpin partai baru dan keputusan-keputusan tentang kebijakan partai.
- *Adanya beberapa kandidat* untuk jabatan yang sama di dalam partai harus diterima oleh semua pihak sebagai bentuk ekspresi dasar dari kehidupan

demokratis partai.

- Hal yang sulit dihindari adalah adanya kecenderungan fungsionaris partai berusaha memperoleh kekuasaan dan pengaruh begitu mereka terpilih menjadi pengurus partai, karena hal ini terkait dengan upaya untuk memperbaiki kemungkinan mereka bertahan hidup di dunia politik. Untuk dapat membatasi kecenderungan ini, diskusi terbuka tentang kebijakan kepemimpinan di dalam partai menjadi cara yang penting untuk menjaga standar demokrasi internal partai.
- Yurisdiksi arbitrase yang berjalan dengan baik di dalam partai juga merupakan badan yang sangat penting di dalam demokrasi internal partai. Mahkamah arbitrase, yaitu bagian yang harus memutuskan hukuman atau bahkan pemecatan terhadap anggota yang perilakunya "merugikan partai", hanya bertanggungjawab kepada musyawarah besar partai itu sendiri dan harus dipilih melalui musyawarah. Hal ini harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota dimungkinkan untuk menggunakan proses yang ada, dan kepemimpinan partai tidak memiliki pengaruh langsung atas pekerjaan dan keputusan badan ini.

Undang-Undang Partai. Sangatlah penting bagi pengadilan umum di suatu negara untuk dapat memeriksa apakah prinsip-prinsip dasar demokrasi internal partai telah ditegakkan dan dilaksanakan dalam prakteknya. Agar pemeriksaan ini dapat dilakukan, hal pertama yang dibutuhkan adalah undang-undang partai yang mengandung sejumlah aturan-aturan dasar yang dirumuskan secara jelas dan sah. Apabila terjadi keraguan, maka anggota dan juga pengadilan umum setempat dapat menggunakan undang-undang partai ini sebagai acuan ketika membuat keputusan yang mengikat, jika dibutuhkan.

Tentu saja pengaturan spesifik dari undang-undang ini berbeda di setiap negara, tergantung pada tradisi kultural dan masyarakatnya. Namun demikian, keberadaan aturan dasar merupakan komponen penting dalam demokrasi itu sendiri dan tidak dapat dinegosiasikan.

Kriteria penting lain untuk demokrasi internal partai di seluruh dunia adalah apakah keberadaan kecenderungan dan aliran lain diperkenankan di dalam partai, karena hanya dengan cara inilah maka proses internal partai untuk mengembangkan tujuan-tujuannya dapat dikelola secara efisien, kritik-kritik dapat dibuat secara efektif, dan pemilihan kandidat untuk pekerjaan dan jabatan-jabatan penting di pemerintahan dapat dilaksanakan.

Tentu saja akan ada bahaya bahwa gerakan-gerakan yang bermacam-macam ini akan secara bertahap menjadi independen dan melemahkan kesatuan partai. Bahaya ini tidak perlu terjadi. Bahaya ini justru akan lebih mungkin menjadi kenyatan apabila pimpinan partai berupaya untuk mencegah kritik dan alternatif-alternatif serta melakukan pengendalian ketat terhadap kehidupan dan perdebatan di dalam organisasi partai.

Ketika kritik, prinsip pluralitas partai dan keterbukaan menjadi bagian dari kehidupan partai sehari-hari, maka kita hampir dapat mengharapkan bahwa seluruh anggota akan memperjuangkan sasaran-sasaran dan keputusan-keputusan partai di muka publik karena mereka memiliki motivasi dan keyakinan terhadapnya. Harapan ini akan menurun apabila keputusan-keputusan partai dipaksakan oleh pimpinan partai terhadap anggotanya, pada akhirnya anggota dapat beranggapan bahwa keyakinan, saran ataupun pemikirannya tidak diperhitungkan di dalam perumusan tujuan-tujuan partai.

Adanya pluralisme di dalam demokrasi itu sendiri bukanlah suatu tanda kelemahan, namun justru kekuatan. Pada akhirnya, hal ini tidak akan mengurangi kemampuan kita dalam bekerja tetapi justru meningkatkan.

Demokrasi internal partai dan kedisiplinan di luar merupakan hal-hal yang saling

mendukung dan melengkapi bagi partai beranggotakan massa yang demokratis.

Bertentangan dengan kesalahpahaman yang banyak berkembang, keragaman ini bukanlah suatu hal yang merugikan efektifitas partai meskipun bentuknya bermacam-macam dan dapat menimbulkan ketegangan di dalam partai. Ketidaksepakatan, konflik dan perbedaan pendapat ataupun kepentingan justru akan dapat meningkatkan efektifitas partai melalui peningkatan upaya integrasi, selama struktur internal partai memungkinkan terjadinya integrasi yang adil dengan mempertimbangkan berbagai posisi.

Di dalam demokrasi, akan selalu terdapat situasi ketegangan antara logika pemikiran dan logika anggota partai. Anggota partai akan selalu tertarik untuk mendahulukan kepentingan dan pandangan mereka sementara kandidat atau calon legislatif dan pejabat pemerintah harus memperluas spektrum pemikirannya dengan menambahkan kepentingan dan perspektif masyarakat agar dapat memenangkan pemilihan. Menemukan keseimbangan yang adil antara dua sudut pandang ini untuk memperbaiki kemungkinan partai dan memenangkan pemilihan merupakan suatu tindakan yang akan selalu sulit dilakukan di dalam kehidupan partai politik.

6. Kepemimpinan dan Demokrasi Partai

Dari sisi pihak-pihak idealis yang berusaha memahami demokrasi secara berlebihan, sudut pandang yang sering dikumandangkan adalah bahwa demokrasi dan kepemimpinan pada prinsipnya tidak sejalan. Persepsi ini adalah bentuk kesalahpahaman tentang demokrasi yang tidak mengindahkan kenyataan bahwa ada bermacam-macam bentuk kepemimpinan politik, yang mana ada bentuk-bentuk yang memang sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip demokratis, sementara bentuk lainnya ada yang menjamin kesuksesan demokrasi.

Kepemimpinan demokratis bersifat partisipatif dan integratif. Kepemimpinan bentuk ini menyatukan pendapat dan pemikiran politik yang berbeda-beda dan dapat meyakinkan sejumlah besar pemilih, atau anggota partai, dengan mengintegrasikan sejumlah kepentingan secara tepat dan tetap dapat diterima oleh hampir seluruh pihak. Jenis kepemimpinan demokratis yang artistik ini tidak berusaha menerapkan kebijakan secara otoriter, namun lebih berusaha mengintegrasikan opini-opini dan kepentingan-kepentingan yang diaspirasikan anggotanya secara bertanggungjawab sesuai dengan situasinya. Ini merupakan bentuk yang sangat penting bagi partai politik. Kepemimpinan ini justru mendukung partisipasi anggota dan tidak

mencegahnya. Kepemimpinan yang cerdas, yaitu kepemimpinan jangka panjang yang stabil dan efektif, merupakan bentuk kepemimpinan yang dapat menciptakan harmoni sebisa mungkin antara politik kepemimpinan dan politik anggota. Cara terbaik dan paling efektif untuk melakukan hal ini adalah ketika anggota mengetahui dan merasakan bahwa pemikiran-pemikiran mereka berada di tangan yang tepat sesuai dengan kebijakan kepemimpinan.

Kepemimpinan demokratis juga dapat berarti bahwa pimpinan partai berusaha memperoleh dukungan atas opininya dalam menanggapi pertanyaan pribadi yang mungkin tidak memperoleh dukungan mayoritas di kalangan anggota partai; namun demikian, pimpinan partai memberikan dukungannya dengan alasan yang baik demi kepentingan negara dan berusaha memperoleh dukungan dengan argumen-argumen yang meyakinkan. Untuk melihat apakah pendekatan ini berhasil untuk peranan pemimpin, setidak-tidaknya dapat kita lihat dari hasil pemilihan pimpinan partai periode berikutnya. Diantara sejumlah kualitas kepemimpinan adalah visi dan juga perasaan tentang kapan dan sejauh mana pimpinan partai dapat menjalankan posisi barunya sesuai dengan harapan mayoritas anggota, karena keyakinan bersama ini dimiliki oleh semua orang.

Kepemimpinan demokratis bukan berarti pimpinan secara otoriter menjalankan kekuasaan pengambilan keputusan, namun lebih berupa integrasi beragam pemikiran dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga meyakinkan kelompok mayoritas.

Platform partai yang mengikat, dan berada dalam posisi setara dengan kepemimpinan dan anggota partai, merupakan dasar eksistensi kepemimpinan demokratis. Kualitas demokrasi pimpinan partai merupakan hal yang nyata di dalam program dasar yang diputuskan oleh anggota partai.

7. Jalan Menuju Partai Berbasis Platform

Partai beranggotakan massa yang demokratis memerlukan program dasar yang valid bagi semua orang dengan sejumlah alasan. Program dasar ini harus dikembangkan di dalam proses demokratis dan valid untuk semua anggota tanpa melihat jabatan mereka. Program dasar ini juga harus dapat menentukan batasan sejauh mana kritik terhadap kebijakan kepemimpinan oleh anggota partai harus dilihat sebagai suatu hal yang sah dan dilakukan untuk kepentingan partai.

Dengan demikian, pembangunan dan manajemen program dasar ini harus menjadi bagian penting dalam melakukan transformasi dari partai dengan kepemimpinan otoriter menjadi partai beranggotakan massa.

Salah satu strategi yang paling efektif untuk menciptakan kondisi partai beranggotakan massa yang sebenarnya adalah proses pengembangan program dasar bersama secara demokratis.

Program-program dasar untuk partai demokratis, dimana identitas politik dan kepentingan bersama yang dimiliki oleh semua anggota seharusnya diekspresikan, tidak hanya terdapat dalam hasil akhir proses perumusan

teks tertulis. Proses pengembangan program itu sendiri juga sama pentingnya dan bahkan sering kali jauh lebih penting.

Mengembangkan program dasar partai bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh para pakar, meskipun pakar-pakar ini tentu saja dapat memainkan peranan yang menentukan dan produktif, namun peranan mereka akan tetap terbatas. Lebih penting lagi untuk melibatkan semua anggota partai untuk terlibat di dalam proses pengembangan ini dengan cara yang jelas dan matang. Hal ini dapat dilakukan dengan ribuan cara yang berbeda dan tergantung sepenuhnya pada keadaan-keadaan tertentu di negara tersebut, pada tradisi budayanya, pada sejarah partai politik tersebut di masa lalu, dan pada kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi tersebut.

Proses demokrasi untuk merumuskan platform partai bukan berarti partai tersebut kekurangan bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan partai ditugaskan untuk menjalankan peran inisiatif, regulatif, dan organisatoris yang lebih besar untuk mendukung kesuksesan keseluruhan proses ini. Pimpinan partai memberikan masukan untuk isi dan pengaturan proses perumusannya dan juga mengkomunikasikan keseluruhan proyek ini kepada publik.

Sasaran dari mengembangkan platform partai ini adalah untuk memberikan perasaan yang terlegitimasi

tentang identitas partai kepada semua anggota, dimana pada akhirnya perasaan ini dapat tercermin dalam teks tertulis program partai. Platform ini nantinya dibentuk, diputuskan dan menjadi bagian dari diri mereka. Tentu saja hal ini bukan berarti bahwa tiap-tiap permintaan dan tuntutan anggota partai atau organisasi dapat dituliskan di dalam program dasar. Oleh karena itu, seleksi di tingkat menengah merupakan tindakan yang sangat-sangat penting untuk menetapkan prinsip-prinsip dan tujuan umum partai, dan harus memberikan portsi yang cukup untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang spesifik. Nilai-nilai dasar partai harus menjadi fokus perhatian, yang mengklarifikasi secara jelas tentang bagaimana setiap orang memahami kebebasan, keadilan dan solidaritas serta apa makna dari nilai-nilai dasar ini dalam membentuk ekonomi, negara dan pemerintah secara umum.

Tidak ada rumusan yang pasti tentang bagai-mana mengintegrasikan keberhasilan pengembangan program ini, prosesnya dapat dimulai dari bawah, melalui inisiatif-inisiatif akar rumput tentang rumusan harapan, permintaan dan sasaran, atau datang dari atas melalui pertanyaan-pertanyaan dan usulan yang diajukan oleh pimpinan atau bahkan dalam bentuk menyediakan naskah tertulis. Apabila pimpinan partai menyampaikan usulan naskahnya untuk didiskusikan, maka harus dipastikan bahwa perwakilan-perwakilan

yang mengikuti diskusi tersebut benar-benar mewakili seluruh spektrum yang ada dalam partai, baik untuk alasan praktis ataupun simbolis.

Bagaimanapun proses pengembangan program ini pada awalnya dilakukan, pimpinan partai tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa sejumlah besar anggota, dan bahkan masyarakat -jika memungkinkan- turut berpartisipasi dalam perencanaannya. Ada bermacam-macam cara dan instrumen untuk melakukan hal ini, diantaranya:

- Mendirikan komisi program pusat yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari berbagai jender, wilayah, orientasi politik, kelompok masyarakat, fungsionaris partai, dan lain-lain. Komisi ini bertugas mengkoordinasikan proses pengembangan program dan bertanggungjawab untuk mengintegrasikan seluruh usulan atau proposal.
- Diskusi publik tentang program dimana pimpinan partai, anggota dan wakil masyarakat saling mendiskusikan nilai-nilai dasar dan sasaran partai.
- Konferensi dan diskusi di tingkat wilayah dimana seluruh anggota di wilayah tersebut memiliki kesempatan untuk mengenali rancangan program secara lebih terperinci di berbagai tingkatan, mempelajari opini pimpinan partai dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan, dan

berkesempatan untuk terlibat aktif.

- Debat di buletin partai. Perdebatan panjang dan intens di buletin partai, dan, jika memungkinkan, di media massa, tentang pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan posisi-posisi kontroversial dan melibatkan opini ahli eksternal.
- Kelompok kerja partai di tingkat cabang dan tingkatan lain yang lebih tinggi, dimana setiap pertanyaan didiskusikan secara intensif oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Perdebatan di internet, dan
- Survei anggota.

Proses pengembangan platform ini menciptakan identitas bersama dengan efek mengikat sebesar tiga kali lipat *(triple binding effect)*. Pimpinan partai terikat dalam proses karena harus menunjukan dengan jelas dan memberikan pembenaran melalui langkah-langkah yang dikembangkannya dalam proses program ini, selaku akar politik partai. Para anggota terikat dalam proses karena tindakan dan posisi mereka di hadapan masyarakat umum dan politik dinilai menurut identitas politik program tersebut. Partai itu sendiri terikat pada proses tersebut di hadapan publik karena tindakan-tindakan partai harus selalu sejalan dan memperjuangkan program dasar yang mereka miliki, jika mereka ingin mempertahankan kredibilitas dan dukungan yang ada.

Program dasar yang dikembangkan oleh semua orang merupakan perekat demokratis yang mempersatukan partai beranggotakan massa dan membuat mereka dapat diidentifikasi dari luar.

Efek tiga kali lipat ini adalah prasyarat untuk menghasilkan partai beranggotakan massa yang sebenarnya. Efek ini mempersatukan anggota dengan satu indetitas politik yang diterima bersama. Hal ini juga memungkinkan pemimpin partai untuk memiliki kontrol yang aktif dan terarah dan bertanggungjawab secara terbuka dan efektif dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati partai, baik di tengah masyarakat dan di seluruh lembaga-lembaga politik.

Dalam mengembangkan program dasar partai beranggotakan massa, beberapa fungsi penting yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- merumuskan identitas politik partai,
- orientasi yang mengikat tentang tugas pimpinan di tengah masyarakat dan insitutsi-institusi politik negara tersebut,
- sosialisasi politik untuk anggota lama dan baru,
- memberikan informasi dan melakukan kampanye publik tentang sasaran partai.

Seluruh sasaran ini merupakan sasaran yang sama validnya dan harus dirumuskan dengan jelas dengan bahasa dan isi sesuai dengan naskah yang telah disepakati.

8. Budaya Politik dan Organisasi Partai

Jika dilihat secara empiris, kita dapat memahami bahwa partai dengan pemimpin otoriter tersebar luas di negara-negara yang terbentuk menurut tradisi dan sedang dalam proses menjadi negara demokrasi. Hal ini sering kali terkait dengan tahap pembangunan tertentu di dalam budaya politik negara tersebut. Struktur masyarakat feodal yang dikombinasikan dengan sistem politik otoriter monarkis akan melahirkan budaya politik yang otoriter *(authoritarianism)* dan *clientelism*. Hal ini merupakan hasil dari tindakan yang sudah mengakar di masyarakat berdasarkan pengalaman politik sehari-hari.

Budaya politik *clientelism* berdasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan politik pada dasarnya merupakan proses timbal balik yang tidak setara. Timbal balik tersebut, sejalan dengan tahap pembangunan struktur politik pada fase pra-demokrasi, dan pada intinya terdiri dari unsur harapan bahwa pemimpin yang otoriter akan memberikan perlindungan, sumber daya dan kemungkinan promosi, dan sebagai gantinya pemimpin tersebut akan mendapatkan dukungan dan loyalitas.

Jenis *clientelism* ini secara kaku hanya memerlukan pelayanan dan bukan partisipasi. Selama pimpinan mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan materil yang diharapkan anggotanya dalam jumlah besar, baik

dalam bentuk tunjangan, kemungkinan pendapatan dan kesempatan promosi atau rasa aman, maka sebagai gantinya para pengikut diharapkan memberikan loyalitas dan dukungan mereka untuk pemimpin yang otoriter. Model clientelist ini tidak mengenali kontribusi atau masukan tentang pelayanan perlindungan atau strategi yang digunakan oleh pimpinan untuk menyediakan sumber daya tersebut. Ini hanyalah sebuah bentuk timbal balik antar kedua belah pihak. Loyalitas ditukar dengan pelayanan.

Salah satu kondisi budaya yang biasanya dibangun dan diterima oleh semua peserta adalah bahwa pimpinan akan mengalami hambatan untuk menjalankan tugasnya secara efektif apabila pengikutnya ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kondisi ini bisa terjadi karena pimpinan memiliki akses khusus ke sumber daya, baik karena legitimasi yang diwarisi, atau karena pimpinan memiliki pengetahuan lebih tentang politik dan budaya dimana sistem itu bekerja. Dan, dilihat dari kondisi-kondisi di atas, sudah hampir dapat dipastikan bahwa pada akhirnya hal ini akan merugikan semua orang.

Apabila pengikut partai terdiri dari petani miskin atau buruh harian yang tidak memiliki pendidikan formal, model ini sering kali diterima dengan keyakinan penuh karena mereka menyadari keterbatasan kemungkinan yang mereka miliki. Hubungan timbal balik dengan

pemimpin yang otoriter terlihat sah secara keseluruhan oleh para pengikutnya dan tentunya merupakan suatu mekanisme defisiensi yang perlu direformasi.

***Clientelism* menghambat pembangunan negara yang keseluruhan sistem politiknya dibentuk dengan proses pengambilan keputusan yang demokratis. Hal ini merupakan masalah besar dalam perkembangan politik di banyak negara, karena tindakan menemukan budaya demokrasi yang sesuai sering kali dikebelakangkan setelah pembentukan lembaga-lembaga demokrasi.**

Dalam situasi seperti ini, lembaga demokratis yang didirikan secara resmi sering kali berfungsi dalam jangka waktu yang lama di tengah-tengah budaya *clientelist* yang bertentangan dengan lembaga-lembaga ini. Apabila situasinya seperti ini, maka akan ada kecenderungan kuat untuk meneruskan perilaku *clientelist*, seperti yang dapat kita temukan dalam budaya politik yang dominan, menuju lembaga-lembaga demokratis dan mencabut makna mereka yang sebenarnya dan klaim yang sah. Lembaga-lembaga yang ada, terutama partai politik, pada luar tampak seperti sebuah entitas politik; namun demikian, mereka pada esensinya berfungsi menurut

standar budaya pra-demokratis kuno.

Kesulitan khusus yang sering kali dihadapi ketika berusaha menyesuaikan cara kerja partai dengan kondisi demokrasi adalah sejumlah besar anggota partai masih percaya bahwa sistem clientelism merupakan sistem yang sah, sementara aktivis demokrasi menderita di bawah sistem ini dan tidak bersedia menerimanya lebih lama lagi dan menuntut perubahan ke arah budaya demokrasi partisipatif. Pertentangan ini pada umumnya mengarah pada destabilisasi partai dan mengurangi kekuatan serta kekuasaan mereka.

Untuk dapat bekerja dan mengamankan legitimasi partai demokratis, maka kita harus secara seksama membentuk demokrasi internal partai yang berorientasi pada partisipasi, terutama apabila pemimpin partai yang sedang berkuasa menunjukan bahwa mereka bersedia dan berada dalam posisi untuk beraliansi dengan aktivis demokrasi. Hal ini tentu saja secara bertahap dapat menjadi kenyataan selama sasaran yang ingin dituju sudah jelas dan tenaga yang diperlukan tidak mengurangi prosesnya. Namun demikian, langkah-langkah ini harus efektif dan dapat dipercaya serta tidak mengesampingkan kebutuhan reformasi demokratis seseorang ataupun disalahartikan.

9. Partai dan Masyarakat Sipil

Anggota partai adalah penghubung antara masyarakat sipil dan organisasi di dalam sistem politik dan dengan demikian memiliki tugas dan fungsi yang ditujukan untuk kedua pihak ini, baik terhadap pusat partai di dalam sistem politik, dan terhadap masyarakat sipil. Hanya partai politik yang dapat memenuhi tiga fungsi penting demokrasi di dalam kultur media massa. Melalui fungsi-fungsi ini, masyarakat akan secara terbuka dan produktif terhubungkan dengan sistem politik:

1. Mereka harus berada dalam posisi untuk mengatur kesempatan komunikasi sosial antar rakyat dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor, rumah, dan dalam forum masyarakat sipil serta ambil bagian secara aktif di dalamnya.

   Mereka adalah pihak yang dapat mencerminkan keberadaan partai baik secara nyata atau simbolis dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat sipil, dan dengan demikian secara jelas menunjukkan bahwa partai adalah bagian dari kehidupan sosial dan bukan sebuah unsur sistem politik yang terpisah dari kehidupan warga negara. Hanya dengan cara ini, pemisahan antara partai dan masyarakat yang semakin melebar dapat ditekan.
2. Keanekaragaman sosial anggota partai merupakan jaminan terbaik untuk mencerminkan bahwa

beragam nilai-nilai sosial, kepentingan, pengalaman, harapan dan gaya hidup terwakili di dalam partai tersebut sehingga partai dapat tetap menjadi perwakilan seluruh masyarakat dan menjadi tempat dimana perdebatan, rancangan politik, bentuk komunikasi, aksi simbolis dan hal-hal baru lainnya diciptakan.

Tanpa adanya anggota aktif yang kompeten dalam spektrum yang luas, partai tidak akan berada dalam posisi untuk memobilisasi dukungan, ataupun memelihara keterkaitan mereka dengan pembangunan dan inovasi masyarakat secara stabil dan terpercaya.

Masyarakat sipil yang hidup merupakan jaminan terbaik untuk demokrasi yang hidup dan partisipatif serta untuk pengembangan demokrasi internal partai. Demokrasi identik dengan aksi bersama warga negara secara sukarela dan mandiri untuk kebaikan bersama. Di dalam prosesnya, masyarakat sipil tidak dapat menggantikan lembaga-lembaga negara dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan keterasingan dan hilangnya kontrol di dunia ini. Masyarakat sipil menuntut sejumlah kondisi dipenuhi oleh negara, dan, selalu dibatasi dalam kaitannya dengan kebutuhan politik untuk mengatur seluruh masyarakat.

Aktivitas masyaraka sipil ditentukan oleh:

- Ketelibatan sukarela
- Mengorganisir diri sendiri
- Orientasi utamanya adalah untuk kebaikan bersama.

Dari cara orang-orang melihat diri mereka sendiri dan bidang pekerjaan yang mereka pilih, kita mendapatkan enam kemungkinan fungsi sosial dan politik yang, dengan berbagai kombinasi, dapat mengenali kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensi politik dalam melakukan suatu aksi di masyarakat sipil:

- Upaya swadaya sosial gabungan
- Pengembangan dan regenerasi solidaritas dan modal sosial;
- Warga neraga melakukan lobi terhadap lembaga-lembaga dalam sistem politik (fungsi intervensi *demokrasi-liberal*);
- Upaya masyarakat untuk mengatur kehidupan politiknya sendiri atau *political self-regulation* (fungsi otonomi *demokrasi-republik*);
- Dialog politik agar publik dapat memahami suatu isu dan memutuskan *(deliberation)*; dan
- *Sosialisasi* politik warga negara.

Meskipun sosialisasi politik warga negara dan regenerasi kesediaan mereka untuk menunjukan

solidaritas "hanyalah" konsekuensi dari aksi yang dilakukan di masyarakat sipil, kedua hal ini terlaksana secara lebih terpercaya dan permanen daripada sistem pendidikan masyarakat, dengan tujuan spesifik yang sama. Ini adalah alasan mengapa aksi di masyarakat sipil menjadi lebih penting untuk kebijakan demokratis.

Partai harus mempromosikan dan mendukung partisipasi demokratis masyarakat kapanpun diperlukan dan memungkinkan. Pertama-tama, hal ini berarti mereka mengatur struktur partai mereka sendiri sebagai sebuah forum masyarakat yang berukuran besar untuk warga negara agar dapat terlibat di dalam proses politik. Lebih daripada itu, hal ini berarti bahwa partai memberdayakan berbagai organisasi partai di tingkat regional dan lokal serta anggota aktifnya forum dan faktor demokrasi sosial di dalam masyarakat sipil.

Dengan demikian, partai politik harus mengorganisir anggotanya dan ketelibatan mereka di dalam keputusan-keputusan agar dapat secara efektif menjadi titik awal dalam masyarakat sipil dan, pada saat yang sama, menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan sistem politik. Agar dapat memenuhi kedua fungsi ini secara terpercaya dan efektif di dalam situasi yang berubah ini, reformasi jangka panjang dan berkesinambungan diperlukan dalam cara kerja, pemahaman masyarakat dan kegiatan-kegiatan anggota partai.

Apabila partai politik dikelola secara demokratis

dan terintegrasi dalam masyarakat sipil, mereka akan menjadi unsur terpenting demokrasi. Mereka memiliki posisi yang paling penting dibandingkan dengan organisasi-organisasi politik lainnya. Alasan pertama mengapa mereka menjadi penting adalah karena partai memiliki tugas untuk mengembangkan platform partai yang mengkompromikan berbagai kepentingan dan nilai dari inisiatif masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Di satu sisi, masyarakat harus dipertimbangkan, dan di sisi lain, organisasi-organisasi harus sebisa mungkin mengenali kepentingan mereka sendiri. Ini merupakan tugas integrasi politik yang diemban oleh partai. Partai politik juga penting di dalam proses mediasi antara kepentingan masyarakat dan keputusan negara karena di satu sisi, partai merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sipil dan di sisi lain, partai ada di dalam lembaga-lembaga negara, dan terwakili melalui parlemen dan pemerintahan, serta mampu untuk mengesahkan undang-undang dan program. Berbeda dengan pemerintah yang memiliki peranan dan penekanannya sendiri, partai politik mampu melaksanakan tindakan yang diminta dan diperjuangkan oleh masyarakat.

Tentu saja, partai akan dapat lebih baik memenuhi fungsi ini ketika mereka diatur secara demokrasi dari dalam. Demokrasi partai dan tindaan yang solid tidak bertentangan satu sama lain dilihat dari sudut pandang

apapun. Jika proses pengambilan keputusan diatur dengan cara yang demokratis dan meyakinkan, anggota juga dapat secara efektif menuntut agar keputusan yang diambil harus disampaikan ke publik secara teratur dan meyakinkan. Kepemimpinan dan demokrasi tidak bertentangan satu sama lain karena kepemimpinan yang baik mengintegrasikan berbagai posisi dengan cara mufakat dan tidak mengurangi kontrol anggota ataupun entitas dasar partai.

Partai dengan pengikut yang kuat, dimana para pengikut berkumpul mengelilingi figur pemimpin yang otoriter dan dilindungi oleh kelompok kecil yang berpengaruh, akan sulit untuk memiliki akar yang kuat di dalam kehidupan masyarakat. Apabila partai itu terbuka, maka mereka akan menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan integrasi politik melalui upaya mediasi antara politik dan masyarakat. "Terbuka" disini berarti menjadi wadah yang terbuka untuk orang-orang dari berbagai asal, jender, etnis, sudut pandang dan latar belakang sosial apabila mereka bersedia untuk mendukung prinsip-prinsip dan sasaran politik partai yang sudah didefinisikan dengan jelas. Mereka sering kali terbuka untuk masyarakat dan juga terbuka secara internal. Demokrasi juga berarti kerjasama dan integrasi. Prinsip-prinsip ini harus mencerminkan organisasi, pemahaman diri, dan budaya politik partai dalam demokrasi.

Peranan utama partai. Partai selalu membedakan diri mereka dari organisasi dan inisiatif masyarakat sipil lain dengan cara yang sangat mendasar. Hanya partai yang berjuang untuk mendapat kursi di parlemen dan dengan demikian dapat ambil bagian menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan porsi keberhasilan mereka dalam pemilu. Partai merupakan bagian dari masyarakat dan bagian dari negara pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat mereka memiliki posisi penting secara politik di dalam hubungannya dengan semua asosiasi politik lain. Karena posisi penting ini lah maka semua organisasi politik lain tertarik untuk bekerjasama dengan sejumlah partai politik karena hanya dengan cara ini mereka dapat mempromosikan sasaran politik mereka yang utama. Partai-partai juga harus tertarik dengan masyarakat sipil yang aktif di tempat-tempat yang masyarakat sipilnya mengklaim independensi dari partai politik. Ini harus dipertimbangkan karena masyarakat sipil merupakan sumber energi yang paling penting untuk demokrasi dan lahan yang subur untuk partai politik.

Kemitraan yang baik antara masyarakat sipil dan partai politik merupakan prasyarat penting untuk tumbuhnya demokrasi di negara manapun dan di dalam partai politik itu sendiri.

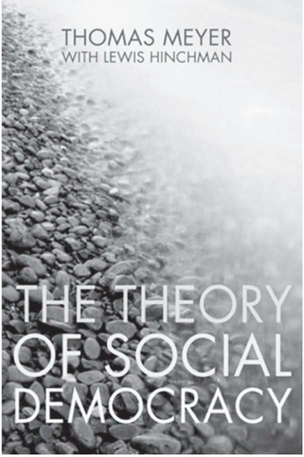
Kesimpulan

Demokrasi massa moderen tidak dapat dikelola tanpa partai politik. Agar dapat memenuhi tugas-tugas demokratis dan fungsi-fungsi sosial mereka, partai politik harus mulai berdemokrasi dari dalam terlebih dahulu. Undang-undang partai politik yang baik dan mengatur tentang nilai-nilai dasar dan standar minimum akan sangat bermanfaat. Demokrasi internal partai hanya akan dapat berjalan apabila sejumlah besar anggota partai yang aktif dan percaya diri memiliki perhatian terhadap tantangan yang mungkin dihadapi partai dalam keseharian mereka.

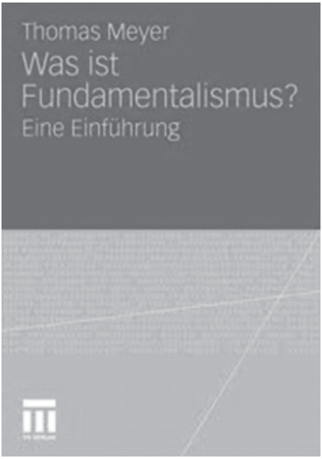
Profil Penulis



Prof. Dr. Thomas Meyer adalah Wakil Ketua Komite Penyusun Prinsip Dasar Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Dia pernah menjadi Direktur Akademi Politik Friedrich-Ebert-Stiftung, Yayasan Politik tertua dan terbesar di Jerman. Setelah pensiun dari tugasnya sebagai Profesor Senior Ilmu Politik di Universitas Dortmund Jerman, sejak 2008 dia menjabat sebagai Editor Jurnal *"Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte"*. Buku terbarunya *"Was ist Fundamentalismus?* (Apa itu Fundamentalisme?) telah dicetak Penerbit Wiesbaden tahun 2011. Thomas Meyer juga menulis banyak buku diantaranya: *The Concept of Social Democracy in Theory and Practice, The Theory of Social Democracy, Identity Mania.*


THOMAS MEYER
WITH LEWIS HINCHMAN
THE THEORY OF SOCIAL DEMOCRACY


Identity Mania
Thomas Meyer


Thomas Meyer
Was ist Fundamentalismus?
Eine Einführung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah sebuah yayasan politik non-pemerintah dari Jerman, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Yayasan ini berdiri tahun 1925 sebagai sebuah warisan politik dari Friedrich-Ebert, Presiden pertama Jerman yang terpilih secara demokratis. Selain di Jerman FES memiliki kantor perwakilan di 90 negara dan melaksanakan kegiatan di lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Kantor Perwakilan di Indonesia secara resmi berdiri sejak 1968. Sejak saat itu FES Indonesia telah menjalankan kegiatan kerjasama dengan berbagai Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, Lembaga Penelitian, dan Instansi Pemerintah terkait di bidang penegakan HAM, demokratisasi, pendidikan politik, fasilitasi dialog sosial, penguatan serikat pekerja, reformasi sektor keamanan, pengarusutamaan gender, dan media.

Friedrich Ebert Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730/INDONESIA
Telp :+62-21- 719 3711
Fax : +62-21- 7179 1358
Email : info@fes.or.id
Website : www.fes.or.id